PARADIGMA BARU PENDIDIKAN ERA KONTEMPORER

IP.042.09.2017

Paradigma Baru Pendidikan Era Kontemporer

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia
oleh **Ideas Publishing**, September 2017

Alamat: Jalan Gelatik No. 24 Kota Gorontalo
Telp/Faks. 0435 830476
e-mail: infoideaspublishing@gmail.com
Anggota Ikapi, No. 001/Ikapi/Gorontalo/02/2014

ISBN : 978-602-6635-31-0

Editor: Abdul Rahmat
Penata Letak: Dede Yusuf
Ilsutrasi dan Sampul: Andri Pahudin

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak Cipta

Pasal 4

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahikan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan peundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak. untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 115

Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektonik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan semua rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun buku ini. Pada kesempatan ini kami mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya buku ini. Semoga amal baik yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda. Amin.

Semoga buku ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi ilmiah dan bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Penulis

SAMBUTAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan semua rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun buku ini. Pada kesempatan ini kami mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya buku ini. Semoga amal baik yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda. Amin.

Apabila seseorang belajar maka setidak-tidaknya untuk waktu tertentu berubah dalam kesediaannya memperlakukan lingkungannya. Belajar adalah proses yang aktif, suatu fungsi dari keseluruhan lingkungan di sekitarnya. Apabila kita berbicara mengenai belajar berarti membicarakan bagaimana tingkah laku itu berubah melalui pengalaman dan latihan.

Teori belajar pada dasarnya mencari jawahan atau mengkaji pertanyaan mengapa perubahan-perubahan itu terjadi, bukan mengkaji bagaimana perubahan itu. Konsep pengajaran dikembangkan berdasarkan teori-teori belajar. Definisi Gordon mengenai teori pengajaran yang telah diterima secara luas adalah seperangkat pernyataan berdasarkan penelitian yang dapat diulang dan terpercaya yang memungkinkan seseorang meramalkan bagaimana perubahan perubahan tertentu dalam lingkungan pendidikan dapat mempengaruhi belajar peserta didik.

Pendidikan sebagai ilmu, menggunakan metode ilmiah dalam mengembangkan teori-teorinya. Sebagai ilmu konsep-konsep, prinsip-prinsip, generalisasi yang terdapat di dalamnya harus telah teruji dan dapat dipercaya serta dapat digunakan dalam menjelaskan, membedakan, meramalkan dan mengontrol fenomena yang dapat diamati. Perkembangan pendidikan kepada tingkat ilmu menimbulkan pertanyaan seberapa jauh proposisi-proposisi yang ada dalam pendidikan dapat diuji seperti hal-nya dengan ilmu-ilmu lainnya.

Akhirnya kami berharap semoga kerja keras dari para penulis yang terdiri dari para dosen di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo ini dapat

dimanfaatkan oleh para peneliti lain yang mungkin dapat dijadikan sebagai sumber referensi ilmiah dan keluaran yang ingin dicapai dari penelitian ini dapat terwujud dan bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Terima kasih juga bagi komunitas "Kelas Menulis" yang telah memberikan inspirasi bagi semua, kepada Ideas Publishing juga saya berterima kasih sudah memfasilitasi untuk penerbitan naskah ini. Insyaalah ini menjadi ladang pahala dari Allah Swt. Aminn.

Akhirnya, semoga kita senantiasa mendapatkan berkah serta karuniaNya. Amin Yaa Rabbal Alamin.

Wasalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Gorontalo, Juli 2017

Rektor

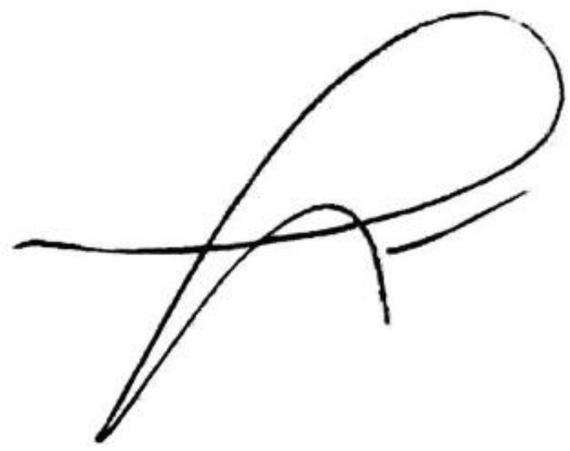

Prof. Dr. H. SyamsuQamar Badu, M.Pd

NIP. 19600603 198603 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v

SAMBUTAN REKTOR UNG vii

DAFTAR ISI ix

PENDIDIKAN KARAKTER SEBAGAI PERWUJUDAN TINGKAH LAKU PESERTA DIDIK

Hakop Walangadi 1-12

METODE *SPIRITUAL GAME* SEBAGAI SUATU INOVASI PEMBELAJARAN

Asni Ilham 13-24

KESALAHAN DALAM MENULIS PERMULAAN

Samsiar Rival 25-32

MENGELOLA MINAT BACA MELALUI METODE BERCERITA BERGAMBAR

Abdul Rahmat dan Mira Mirnawati 33-48

PENDIDIKAN HAK SETIAP WARGA NEGARA

Antara Harapan dan Kenyataan

Ramlani Lina Sinaulan 49-56

IMPLEMENTASI KEBIAJAKAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

Novianty Djafri 57-80

BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH DASAR

Salma Halidu 81-96

KREATIVITAS MEMBUAT BONEKA KERTAS "BILENDITI"

Samsiah 97-108

EVALUASI PROGRAM AUDIT MUTU PEMBELAJARAN

Zulaecha Ngiu 109-126

MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA

Arifin Hamzah 127-138

REVOLUSI MENTAL SISWA
Permasalahan dan Solusi

Maryam Rahim 139-154

GRAMMATICAL ERRORS IN STUDENTS' WRITING

Sri Widyarti Ali 155-166

PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN SEJARAH

Syaiful Kadir 167-175

MODEL *VALUE CLARIFICATION TECHNIQUE* UNTUK PEMBELAJARAN

Wa Ode Arini Maut 177-184

APLIKASI TEORI PERUBAHAN SOSIAL DALAM MEMBERDAYAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

Rusmin Husain 185-198

INOVASI DAN MODERNISASI PENDIDIKAN DALAM GERAKAN PERUBAHAN PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU

Warni Tune Sumar 199-219

Index 220

APLIKASI TEORI PERUBAHAN SOSIAL DALAM MEMBERDAYAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

Rusmin Husain
Universitas Negeri Gorontalo
email: rusmin.husain@ung.ac.id

Untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran, kapasitas laju pertumbuhan harus lebih tinggi dari laju inflasi, sehingga kenaikan pendapatan secara riil meningkat. Pengangguran dan kemiskinan juga dapat diturunkan. Demikian pula, kualitas pertumbuhan yang dicapai juga akan memengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja. Jika kualitas pertumbuhan yang dicapai lebih banyak ditopang oleh konsumsi daripada ekspor, investasi dan sektor industri juga lebih padat modal, maka kemampuan menyerap pengangguran menjadi rendah. Namun, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kualiats pertumbuhan yang dicapai dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antargolongan masyarakat atau gini ratio.

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi dan politik yang membaik dalam lima tahun terakhir membawa optimisme terhadap perubahan yang lebih baik lagi dalam masa kedua pemerintahan SBY. Pemerintah juga bertekad untuk mengatasi berbagai hambatan (*bottleneck*) untuk memacu perekonomian. Selain itu, untuk memacu perekonomian nasional, kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan kebijakan konvensional yang telah berlangsung selama ini. Kebijakan yang ada sudah terbukti tidak mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi lebih cepat.

Padahal, sesungguhnya banyak potensi sumber daya nasional yang belum didayagunakan untuk memacu kualitas pertumbuhan menjadi lebih tinggi

lagi. Kebijakan dalam mengelola stabilitas makroekonomi, yang selama ini dinilai cukup berhasil, seharusnya diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar menyentuh perbaikan secara menyeluruh sektor riil dan seluruh kehidupan masyarakat.

Pengelolaan stabilitas makroekonomi, masih cenderung konservatif, karena hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekitar 5-6 persen. Angka ini sangat konservatif untuk dapat mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Untuk dapat mengatasi angka kemiskinan dan pengangguran, pemerintah harus memacu pertumbuhan rata-rata di atas tujuh persen per tahun. Sebab, laju inflasi sendiri masih lebih tinggi dari pencapaian pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari laju inflasi, menyebabkan kenaikan pendapatan yang diterima masyarakat menjadi tergerus oleh laju inflasi.

Kebijakan yang terkait dengan sektor keuangan, selain diarahkan untuk memperkuat stabilitas sektor keuangan juga harus meningkatkan peran intermediasi yang mampu mendorong perkembangan sektor riil. Peran sektor perbankan belum optimal dalam menjalankan peran intermediasi karena masih tingginya suku bunga pinjaman meskipun suku bunga SBI sudah terus bergerak turun. Ini menyebabkan upaya mendorong kegiatan sektor riil, yang justru membutuhkan suku bunga rendah, tak bisa dilakukan secara optimal. Jika kondisi seperti ini dibiarkan, maka kebijakan tersebut tidak banyak mendorong pertumbuhan yang berkualitas, dalam artian stabil, merata, dan berkelanjutan.

Sementara itu, strategi kebijakan yang terkait dengan sektor riil, diarahkan untuk memberdayakan potensi nasional (*resources base industry*) yakni sektor pertanian/kelautan, kehutanan, pertambangan dan energi. Untuk mendukung kebijakan ini, segala perangkat ekonomi nasional, seperti kebijakan investasi, kebijakan fiskal, moneter, dan perbankan harus diarahkan pada pengembangan sektor-sektor tersebut, sehingga hasil dari sektor-sektor tersebut dapat berupa produk final, sehingga memiliki nilai tambah (*added value*) yang tinggi. Dan tentunya semua ini harus mampu menciptakan *value chain* atau keterkaitan *up-stream* dan *down stream* yang mantap. Untuk mendorong perkembangan sektor riil, perbaikan iklim investasi menjadi sangat penting.

Perbaikan iklim investasi harus mencakup tiga komponen utama, yaitu. Pertama, kelompok kebijakan pemerintah yang memengaruhi biaya (*cost*) seperti pajak, beban perizinan, dan pungli (*red tape*), korupsi, infrastruktur, ongkos operasi, investasi perusahaan (*finance cost*), dan intervensi di pasar

tenaga kerja. Kedua, kelompok yang memengaruhi risiko yang terdiri atas stabilitas makroekonomi, stabilitas, dan prediktibilitas kebijakan, hak properti (*property right*), kepastian kontrak, dan hak untuk mentransfer keuntungan.

Ketiga adalah hambatan untuk kompetisi yang terdiri atas hambatan regulasi untuk masuk dan keluar dari kegiatan bisnis, berfungsinya pasar keuangan dan infrastruktur. Untuk memacu perekonomian, daya saing industri manufaktur harus memeroleh pehatian serius karena sektor industri ini sudah masuk fase deindustrialisasi secara berlanjut, sehingga memperburuk daya saing industri dan ekspor. Ancaman deindustrialisasi itu ditandai oleh kontribusi sektor industri manufaktur yang lebih rendah daripada pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Selama era Orde Baru, pertumbuhan sektor manufaktur lebih tinggi daripada pertumbuhan PDB. Kinerja pertumbuhan sektor manufaktur dalam dua tahun terakhir tidak menggembirakan. Sektor tersebut tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ideal sektor manufaktur harus lebih dari tujuh persen agar target ekonomi bisa tumbuh lebih dari enam persen.

Demikian pula, suatu negara berhasil dalam proses industrialisasinya jika kontribusi sektor industri manufaktur mencapai 35 persen, sementara industri nasional kita hanya mencapai 27,9 persen pada tahun lalu dengan kecenderungan yang terus menurun. Memburuknya kinerja sektor industri ini juga memicu penurunan elastisitas penyerapan tenaga kerja selain juga berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja. Menurut standar organisasi buruh internasional, penyerapan tenaga kerja bisa mencapai satu persen dari pertumbuhan ekonomi atau sekitar 400.000 orang. Tapi, pertumbuhan ekonomi kita diperkirakan hanya menyerap 200.000 orang. Selain memperbaiki iklim investasi, Indonesia harus memperbaiki faktor-faktor yang memberi kemudahan dalam memulai bisnis sehingga kebijakan dan program dibidang investasi akan semakin baik. Dari sisi domestik tingkat bunga yang rendah dan likuiditas perbankan yang mudah mengalir ke sektor riil akan mendorong pertumbuhan usaha. Di luar faktor finansial, keterbatasan infrastruktur, dan masalah konsistensi penegakan hukum termasuk masalah pasokan energi listrik, serta meningkatnya persaingan antarnegara harus segera diatasi agar tidak menyulitkan Indonesia untuk menarik investasi asing. Selain itu, pemerintah juga harus mempercepat penyerapan anggaran dengan perbaikan mekanisme perencanaan dan mempercepat pembelanjaannya. Perbaikan dari sisi prosedur pencairan anggaran akan dapat mempercepat penyerapan anggaran sehingga

dapat menggerakkan perekonomian. Prosedur ini seringkali terkendala oleh politisasi di Senayan sehingga pencairan anggaran seringkali berbelit dan dapat memperlambat pembiayaan proyek ataupun stimulus fiskal seperti saat ini.

Untuk mengatasi perekonomian yang mulai didominasi oleh ekonomi spekulasi atau ekonomi *bubble,* kebijakan untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian, menjadi sangat penting. Ekonomi syariah menekankan pada nilai-nilai etis, yang menekankan aspek keadilan serta menghilangkan segala bentuk penghisapan dan penindasan terhadap pihak lain sehingga melahirkan ketimpangan. Perlindungan etika dan moral telah hilang dalam ekonomi spekulasi atau dalam sistem keuangan konvensional. Krisis keuangan global yang dipicu oleh *subprime mortgage* merupakan *resultante* dari ekonomi spekulasi atau *bubble* tersebut.

Dalam pengembangan ekonomi masyarakat terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan konservatif dan radikal. Kedua pendekatan tersebut berpengaruh pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu pada tulisan ini akan dibahas mengenai kedua hal tersebut.

Pembahasan

A. Pengembangan Ekonomi di Pandang dari Sisi Konservatif

Konservatisme adalah sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional. Istilah ini berasal dari kata dalam bahasa Latin, *conservāre, melestarikan*; "menjaga, memelihara, mengamalkan". Karena berbagai budaya memiliki nilai-nilai yang mapan dan berbeda-beda, kaum konservatif di berbagai kebudayaan mempunyai tujuan yang berbeda-beda pula. Sebagian pihak konservatif berusaha melestarikan status quo, sementara yang lainnya berusaha kembali kepada nilai-nilai dari zaman yang lampau, *the status quo ante*. Samuel Francis mendefinisikan konservatisme yang otentik sebagai "bertahannya dan penguatan orang-orang tertentu dan ungkapan-ungkapan kebudayaannya yang dilembagakan." Roger Scruton menyebutnya sebagai "pelestarian ekologi sosial" dan "politik penundaan, yang tujuannya adalah mempertahankan, selama mungkin, keberadaan sebagai kehidupan dan kesehatan dari suatu organisme sosial."

Konservatisme belum pernah, dan tidak pernah bermaksud menerbitkan risalat-risalat sistematis seperti *Leviathan* karya Thomas Hobbes atau *Two*

Treatises of Pemerintah karyaLocke. Akibatnya, apa artinya menjadi seorang konservatif di masa sekarang sering kali menjadi pokok perdebatandan topik yang dikaburkan oleh asosiasi dengan bermacam-macam ideologi atau partai politik (dan yang seringkali berlawanan). R.J. White pernah mengatakannya demikian: *"Menempatkan konservatisme di dalam botol dengan sebuah label adalah seperti berusaha mengubah atmosfer menjadi cair … Kesulitannya muncul dari sifat konservatisme sendiri. Karena konservatisme lebih merupakan suatu kebiasaan pikiran, cara merasa, cara hidup, daripada sebuah doktrin politik."*

Meskipun konservatisme adalah suatu pemikiran politik, sejak awal, ia mengandung banyak alur yang kemudian dapat diberi label konservatif, baru pada Masa Penalaran, dan khususnya reaksi terhadap peristiwa-peristiwa di sekitar Revolusi Perancis pada 1789, konservatisme mulai muncul sebagai suatu sikap atau alur pemikiran yang khas. Banyak orang yang mengusulkan bahwa bangkitnya kecenderungan konservatif sudah terjadi lebih awal, pada masa-masa awal Reformasi, khususnya dalam karya-karya teolog Anglikan yang berpengaruh, **Richard Hooker** – yang menekankan pengurangan dalam politik demi menciptakan keseimbangan kepentingan-kepentingan menuju keharmonisan sosial dan kebaikan bersama. Namun baru ketika polemik Edmund Burke muncul - *Reflections on the Revolution in France* - konservatisme memperoleh penyaluran pandangan-pandangannya yang paling berpengaruh.

Konservatisme merupakan suatu sudut pandangan atau sudut kerangka pemikiran. Perbedaan umum bagi konservatisme adalah radikalisme, akan tetapi apa yang radikal dalam suatu keadaan, misalnya liberalisme klasik di Perancis sebelum 1789 bisa menjadi konservatif dalam keadaaan yang lain. Pada hakikatnya kaum konservatif berpendapat bahwa apa yang telah terjadi pada masa lalu pasti membawa sangsi moral di masa depan. Jadi kaum konservatif tidak terganggu oleh lemahnya argumentasi liberal klasik tentang hak-hak dasar dan milik pribadi. Ketimpangan dan tanggung jawab sosial kaum konservatif cenderung melihat masyarakat yang adil sebagai masyarakat yang penuh ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik walaupun memang inilah ciri-ciri semua masyarakat di sepanjang sejarah. Dengan demikian secara klasik konservatif berdiri bertentang dengan asumsi-asumsi dan ketentuan-ketentuan sebelah kiri, tetapi konservatif juga berdiri bertentangan dengan ideologi kanan yaitu fasisme, yang menggambarkan asumsi dasar yang sama dengan ideologi kiri.

Pada ekonomi konservatif berkenaan dengan (1) ilmu ekonomi mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan); **2** pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dsb yang berharga; **3** tata kehidupan perekonomian (suatu negara); **4** *cak* urusan keuangan rumah tangga (organisasi, negara).

Selain itu sistem ekonomi konservatif berkenaan dengan perdagangan, perindustrian berdasarkan teori-teori ekonomi; menghindari pemborosan uang, tenaga, waktu; berhemat; tindakan (aturan atau cara) berekonomi; dan segala sesuatu yang bertalian dengan asas-asas ekonomi.

Berdasarkan *paradigma konservatif* secara hukum, investasi asing dibatasi, dan hanya diundang masuk kalau sangat terpaksa dibutuhkan. Pemerintah harus memberikan batasan-batasan pengaturan yang ketat. Peran Pemerintah harus mengedepan dalam melakukan regulasi dalam rangka memberikan perlindungan bagi investor domestik untuk kepentingan perekonomian nasional. Kebijakan hukum investasi yang berparadigma konservatif di Indonesia, berakhir pada akhir tahun 1966 pada saat Indonesia mengeluarkan kebijakan hukum investasi baru pada tahun 1967 dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Paradigma kebijakan hukum investasi pada masa ini pada dasarnya berorientasi pada *paradigma liberal* yang memberikan uluran tangan bagi investasi dan investor asing, namun ideologi ekonomi yang dianut dalam konstitusi mengarah ke *welfare state* yang merupakan reaksi terhadap kegagalan *kapitalisme klasik* dan *liberalisme,* sebagaimana dinyatakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa :"Konsep *welfare state* sendiri lahir karena kegagalan kapitalisme klasik dan liberalisme yang didasarkan atas faham individualisme sehingga terjadi krisis perekonomian dunia di awal abad ke-20. Namun konsep *welfare state* dan perkembangan masyarakat yang kompleks melahirkan keadaan over regulasi yang menguatkan peran negara dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan tersebut pada pertengahan abad ke-20 disadari sebagai kelemahan bersamaan dengan munculnya gelombang demokratisasi dan privatisasi.

Pengaruh konsep *welfare state* dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks melahirkan pula suatu keadaan over regulasi. Hal inilah yang terjadi pada masa itu yang mengcerminkan adanya sikap ambivalen dan gamang dalam menetapkan kebijakan hukum investasi. Ciri-ciri tersebut ditandai dengan sikap-sikap yang sering berubah-ubah (ambivalen) dalam penentuan kebijakan

hukum investasi, misal di satu sisi memberikan kebebasan bagi investasi asing tetapi sekaligus memberikan batasan-batasan yang kadang-kadang cukup ketat, mengurangi insentif yang telah ditetapkan, adanya inkonsistensi antara aturan perundang-undangan dengan aturan pelaksanaannya, masih sering ada perbedaan sikap sektoral dalam kebijakan pengaturan investasi, baik yang terkait insentif pajak, bea masuk ataupun aspek pengaturan prosedural lainnya.

Realitas kebijakan hukum investasi yang demikian pada masa tersebut, dapat dikategorikan sebagai suatu kebijakan hukum investasi yang berparadigma ambivalen dan bersifat oportunistis. Dikatakan ambivalen, karena kebijakan tersebut sering berubah sikap dan tidak tegas, walaupun tidak ada perubahan faktor pengaruh yang sangat mendasar, sehingga terkesan tidak ada suatu dasar argumentasi yang kuat untuk menopang berubahnya suatu kebijakan.

Konsep konservatif berkeyakinan bahwa kemiskinan itu tidak dapat dianggap berasal dari struktur sosial atau struktur politik, namun dari sifat khas orang miskin itusendiri. Orang, katanya, menjadi miskin karena bodoh. Sudah bodoh malas lagi; dan sudah malas boros lagi. Jelas sekali konsep konservatif mengenai kemiskinan itu menjatuhkan segala sanksinya kepada kesalahan individu. Tidak ada kaitannya dengan struktur sosial (yang menunjukkan lapisan-lapisan sosial yang *untouchable*) dan struktur politik (lapisan-lapisan kekuasaan yang membendung rizki menetes ke bawah) yang hidup dalam suatu masyarakat. Benar-benar lantaran si ibu-ibu yang menyeliksik kutu (dan lisa) di emper rumahnya itulah biang keroknya, bukan karena mereka tidak mempunyai aksesibilitas untuk mendapatkan informasi, pendidikan, dan kredit yang berguna. Oleh karena itu teori aksesibilitas harus gugur jika berhadapan dengan konsep kemiskinan konservatif.

Akan tetapi yang tetap menjadi pertanyaan adalah: Jika orang telah menjadi pintar, memiliki ijazah, tidak malas, mempunyai motivasi untuk berprestasi tinggi, berjiwa swasta yang tegar, dan mempunyai rencana yang jelas (yang dapat dinilai oleh pejabat perbankan ketika menguji kajian kelayakan untuk memperoleh kredit), apakah si ibu-ibu atau orang-orang miskin lainnya, akan secara otomatis mempunyai peluang untuk menaikkan martabatnya dalam kehidupan ekonomi? Seorang sarjana ekonomi yang telah lulus dengan pujian, tidaklah otomatis dapat meraih posisi yang sama dengan sarjana lainnya yang lulusnya hanya dengan pas-pasan yang pada masa kuliahnya dibayang-bayangi pemecatan, karena sarjana yang terakhir ini ternyata mempunyai akses yang luas yang mungkin diperolehnya dari ayahnya

yang menjabat kedudukan yang basah dan mempunyai jaringan sosial-politik yang meyakinkan.

Jadi, kemiskinan itu bukanlah hanya disebabkan oleh kebodohan, kemalasan, motivasi yang rendah, dan tidak mempunyai rencana jangka-panjang yang semuanya terpulang pada individu yang bersangkutan. Bahkan sebaliknya, banyak kasus yang menunjukkan bahwa orang bodoh, malas, motivasi rendah, dan tidak mempunyai rencana masa depan yang jelas, justru mendapatkan posisi ekonomi yang tinggi dan sudah tentu status sosial yang bergengsi. Jadi, kemiskinan itu tidaklah selalu mempunyai fungsi linier dengan kebodohan, kemalasan, dan sebagainya itu. Nyatanya jauh lebih kompleks daripada apa yang diperkirakan oleh konsep konservatif. Dalam hal ini konsep konservatif rupanya terlalu menyederhanakan masalah.

B. Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Pandang dari Sisi Radikal

Menurut Ermaya (2004:1) radikalisme adalah paham atau aliran radikal dalam kehidupan politik. Radikal merupakan perubahan secara mendasar dan prinsip. Secara umum dan dalam ilmu politik, radikalisme berarti suatu konsep atau semangat yang berupaya mengadakan perubahan kehidupan politik secara menyeluruh, dan mendasar tanpa memperhitungkan adanya peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan konstitusional, politis, dan sosial yang sedang berlaku. Ada juga menyatakan bahwa radikalisme adalah suatu paham liberalisme yang sangat maju (*Far Advanced Liberalism*) dan ada pula yang menginterpretasikan radikalisme sama dengan ekstremisme /fundamentalisme. Adanya pertentangan yang tajam itu menyebabkan konsep radikalisme selalu dikaitkan dengan sikap dan tindakan yang radikal, yang kemudian dikonotasikan dengan kekerasan secara fisik. Istilah radikalisme berasal dari radix yang berarti akar, dan pengertian ini dekat dengan fundamental yang berarti dasar. Dengan demikian, radikalisme berhubungan dengan cita-cita yang diperjuangkan, dan melihat persoalan sampai ke akar-akarnya. Demikian juga halnya dengan fundamentalisme, berhubungan dengan cita-cita yang diperjuangkan, dan kembali ke azas atau dasar dari suatu ajaran.

Ada beberapa sebab yang memunculkan radikalisme dalam bidang ekonomi, antara lain, (1) pemahaman yang keliru atau sempit tentang ekonomi yang berlaku, (2) ketidak adilan sosial, (3) kemiskinan, (4) dendam politik dengan menjadikan ajaran ekonomi sebagai satu motivasi untuk membenarkan tindakannya, dan (5) kesenjangan sosial atau irihati atas keberhasilan orang lain.

Prof. Dr. H. Afif Muhammad, MA (2004:25) menyatakan bahwa munculnya kelompok-kelompok radikal akibat perkembangan sosio-politik yang membuat termarginalisasi, dan selanjutnya mengalami kekecewaan, tetapi perkembangan sosial-politik tersebut bukan satu-satunya faktor. Di samping faktor tersebut, masih terdapat faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan kelompok-kelompok radikal, misalnya kesenjangan ekonomi dan ketidak-mampuan sebagian anggota masyarakat untuk memahami perubahan yang demikian cepat terjadi.

Secara teoretis, pengembangan ekonomi masyarakat dapat dikatakan sebagai sebuah pendekatan pekerjaan sosial yang dikembangkan dari dua perspektif yang berlawanan, yakni aliran kiri (sosialis-Marxis) dan kanan (kapitalis-demokratis) dalam spektrum politik. Dewasa ini, terutama dalam konteks menguatnya sistem ekonomi pasar bebas dan "swastanisasi" kesejahteraan sosial,pengembangan ekonomi masyarakat semakin menekankan pentingnya swadaya dan keterlibatan informal dalam mendukung strategi penanganan kemiskinan dan penindasan, maupun dalam memfasilitasi partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Secara garis besar, Twelvetrees (1991) membagi perspektif pengembangan ekonomi masyarakat ke dalam dua bingkai, yakni pendekatan "profesional" dan pendekatan "radikal". Pendekatan profesional menunjuk pada upaya untuk meningkatkan kemandirian dan memperbaiki sistem pemberian pelayanan dalam kerangka relasi-relasi sosial. Sementara itu, berpijak pada teori struktural neo-Marxis, feminisme dan analisis anti-rasis, pendekatan radikal lebih terfokus pada upaya mengubah ketidakseimbangan relasi-relasi sosial yang ada melalui pemberdayaan kelompok-kelompok lemah, mencari sebab-sebab kelemahan mereka, serta menganalisis sumber-sumber ketertindasannya.

Sebagaimana diungkapkan oleh Payne (1995:166), "*This is the type of approach which supports minority ethnic communities, for example, in drawing attention to inequalities in service provision and in power which lie behind severe deprivation.*" Seperti digambarkan oleh Tabel 1, dua pendekatan tersebut dapat dipecah lagi ke dalam beberapa perspektif sesuai dengan beragam jenis dan tingkat praktik pengembangan ekonomi masyarakat. Sebagai contoh, pendekatan profesional dapat diberi label sebagai perspektif (yang) tradisional, netral dan teknikal. Sedangkan pendekatan radikal dapat diberi label sebagai perspektif transformasional (Dominelli, 1990; Mayo, 1998).

Berdasarkan perspektif di atas, pengembangan ekonomi masyarakat dapat diklasifikasikan kedalam enam model sesuai dengan gugus profesional

dan radikal (Dominelli, 1990: Mayo, 1998). Keenam model tersebut meliputi: Perawatan Masyarakat, Pengorganisasian Masyarakat dan Pembangunan Masyarakat pada gugus profesional; dan Aksi Masyarakat Berdasarkan Kelas Sosial, Aksi Masyarakat Berdasarkan Jender dan Aksi Masyarakat Berdasarkan Ras (Warna Kulit) pada gugus radikal .

Tabel 1: Dua Perspektif Pengembangan Masyarakat

Perspektif	Tujuan/Asumsi
Profesional (Tradisional, Netral Teknikal)	• Meningkatkan inisiatif masyarakat, termasuk kemandirian. • Memperbaiki pemberian pelayanan sosial dalam kerangka relasi sosial yang ada.
Radikal (Transformasional)	• Meningkatkan inisiatif masyarakat, memperbaiki pemberian pelayanan sosial. • Pemberdayaan masyarakat guna mencari akar penyebab ketertindasan dan diskriminasi. • Mengembangkan strategi dan membangun kerjasama dalam melakukan perubahan sosial sebagai bagian dari upaya mengubah relasi sosial yang menindas, diskriminatif, dan eksploitatif.

Sumber: diadaptasi dari Mayo (1998:166)

Tabel 2: Model-Model Pengembangan Masyarakat

Perspektif	Model
Profesional (Tradisional, Netral, Teknikal)	Perawatan Masyarakat, Pengorganisasian Masyarakat Pembangunan Masyarakat
Radikal (Transformasional)	Aksi Masyarakat Berdasarkan Kelas Aksi Masyarakat Berdasarkan Jender Aksi Masyarakat Berdasarkan Ras (Warna Kulit)

Sumber: diadaptasi dari Mayo (1998:167)

1. Perawatan Masyarakat merupakan kegiatan volunter yang biasanya dilakukan oleh warga kelas menengah yang tidak dibayar. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kesenjangan legalitas pemberian pelayanan.
2. Pengorganisasian Masyarakat memiliki fokus pada perbaikan koordinasi antara berbagai lembaga kesejahteraan sosial.
3. Pembangunan Masyarakat memiliki perhatian pada peningkatan keterampilan dan kemandirian masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
4. Aksi Masyarakat berdasarkan kelas bertujuan untuk membangkitkan kelompok-kelompok lemah untuk secara bersama-sama meningkatkan kemampuan melalui strategi konflik, tindakan langsung dan konfrontasi.

5. Aksi Masyarakat berdasarkan gender bertujuan untuk mengubah relasi-relasi-relasi sosial kapitalis-patriakal antara laki-laki dan perempuan, perempuan dan negara, serta orang dewasa dan anak-anak.
6. Aksi Masyarakat berdasarkan ras (warna kulit) merupakan usaha untuk memperjuangkan kesamaan kesempatan dan menghilangkan diskriminasi rasial.

TABEL

PROBLEMATIKA PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT GORONTALO

KONSERVATIF	DAMPAK/ FUNGSI	RADIKAL	DAMPAK/FUNGSI
1. Industry pariwisata:		1. Industry pariwisata:	
Industri perhotelan	Sebagai tempat menginap/ istirahat sementara	Industri perhotelan	Sebagai tempat menginap/istirahat /rapat/seminar/ diklat
Industry kuliner	Sebagai tempat makan	Industry kuliner	Sebagai tempat makan, rekreasi dan rapat/pesta
Industry hiburan	Sebagai tempat wisata	Industry hiburan	Sebagai tempat wisata, bisnis, dan ajang pertemuan
2. industri manufactur:		2. industri manufactur Industry teknik rekayasa	
Industry teknik rekayasa	Penyedia barang kebutuhan masyarakat		Penyedia barang dan jasa masyarakat

3. Industry perbankan:		3. Industry perbankan:	
Koperasi	Penyedia modal skala kecil	Koperasi	Perubahan pola fikir yang radikal dalam hal menabung sda
BPR	Penyedia modal skala kecil menengah	BPR	Belum dilaksanakan
Credit Union	Penyedia dan perkumpulan dana	Credit Union	Pelayanan surat menyurat manual dan elektronik dan internet
4. Industry postel:		4. Industry postel:	
Pos	Pelayanan surat menyurat manual	Pos	Pelayanan surat menyurat elektronik
Telegram/ teleks	Pelayanan surat menyurat secara elektronik analog	Telegram/teleks	Pelayanan telekomunikasi
Telepon	Pelayanan telekomunikasi suara	Telepon	suara analog dan digital
5. Industry layanan sosial:		5. Industry layanan sosial:	
Penitipan anak	Penyedia jasa menjaga anak (balita)	Penitipan anak	Jasa menjaga anak balita secara terpadu
Panti asuhan	Penyedia jasa perawatan anak, orang dewasa	Panti asuhan	Jasa merawat anak dan orang dewasa yang terlantar

SIMPULAN

Konsep konservatif berkeyakinan bahwa kemiskinan itu tidak dapat dianggap berasal dari struktur sosial atau struktur politik, namun dari sifat khas orang miskin itu sendiri. Orang, katanya, menjadi miskin karena bodoh. Sudah bodoh malas lagi; dan sudah malas boros lagi. Jelas sekali konsep konservatif mengenai kemiskinan itu menjatuhkan segala sanksinya kepada kesalahan individu. Tidak ada kaitannya dengan struktur sosial (yang menunjukkan lapisan-lapisan sosial yang *untouchable*) dan struktur politik (lapisan-lapisan kekuasaan yang membendung rizki menetes ke bawah) yang hidup dalam suatu masyarakat. Benar-benar lantaran si ibu-ibu yang menyelisik kutu (dan lisa) di emper rumahnya itulah biang keroknya, bukan karena mereka tidak mempunyai aksesibilitas untuk mendapatkan informasi, pendidikan, dan kredit yang berguna. Oleh karena itu teori aksesibilitas harus gugur jika berhadapan dengan konsep kemiskinan konservatif.

Radikalisme adalah paham atau aliran radikal dalam kehidupan politik. Radikal merupakan perubahan secara mendasar dan prinsip. Secara umum dan dalam ilmu politik, radikalisme berarti suatu konsep atau semangat yang berupaya mengadakan perubahan kehidupan politik secara menyeluruh, dan mendasar tanpa memperhitungkan adanya peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan konstitusional, politis, dan sosial yang sedang berlaku.

REFERENSI

CC RODEE, *Pengantar Ilmu Politik*, Rajawali Pers, Jakarta: 1993.

Hasan Muhammad Tiro, *Demokrasi Untuk Indonesia*, TEPLOK PRESS, Jakarta: 1999.

Ian Gough, *The Political Economy of Welfare State*, (London and Basingstoke, 1979), h.1;

John Naisbitt& Patricia Aburdene, *Megatrends 2000*, (London; Sigwick and Jacson, 1990), h. 134-135."

AMA (1993), *Local Authorities and Community Development: A Strategic Opportunity for the 1990s*, London: Association of Metropolitan Authorities

Dominelli, L. (1990), *Women and Community Action*, Birmingham: Venture Press.

Mayo, M. (1994), "Community Work", dalam Hanvey and Philpot (eds), Practising Social Work, London: Routhledge.

--------, (1998), "Community Work", dalam Adams, Dominellidan Payne (eds), Social Work: Themes, Issues and Critical Debates, London: McMillan.

Payne, M. (1995), *Social Work and Community Care*, London: McMillan.

Suharto, Edi (1997), *Pembangunan, KebijakanSosialdanPekerjaanSosial: Spektrum Pemikiran*, Bandung: LembagaStudi Pembangunan STKS (LSP-STKS).

Twelvetrees, A. (1991), *Community Work*, London: McMillan

Slamet Sutrisno, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, ANDI, Yogyakarta: 2006.

Vic George Dkk, Ideologi dan Kesejahteraan Rakyat, Grafiti, Jakarta: 1992

Http://www.bppk.depkeu.go.id/webpegawai/index.php/Modul-LPJ/View-category.html

PARADIGMA BARU PENDIDIKAN ERA KONTEMPORER

PENULIS:
Hakop Walangadi
Asni Ilham
Samsiar Rival
Abdul Rahmat dan Mira Mirnawati
Ramlani Lina Sinaulan
Novianty Djafri
Salma Halidu
Samsiah
Zulaecha Ngiu
Arifin Hamzah
Maryam Rahim
Sri Widyarti Ali
Syaiful Kadir
Wa Ode Arini Maut
Rusmin Husain
Warni Tune Sumar

ideas PUBLISHING

Jl. Gelatik No.24 Kota Gorontalo
e-mail: infoideaspublishing@gmail.com
Telp./faks. 0435-830476

ISBN 978-602-6635-33-0